

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Salah satu prioritas pembangunan sektor sosial adalah pemerintah meningkatkan jaminan dan kesejahteraan sosial, khususnya perlindungan kelompok penduduk miskin. Perlindungan dan kesejahteraan sosial di Indonesia dilaksanakan dalam bentuk bantuan sosial dan jaminan sosial. Bantuan sosial adalah pendanaan yang diberikan oleh pemerintah pusat atau daerah dalam bentuk uang, barang atau jasa kepada kelompok miskin dan/atau kurang beruntung secara sosial agar mereka dapat meningkatkan taraf hidupnya secara wajar.

Bantuan sosial Bantuan sosial, juga dikenal sebagai bansos sebagai pemberian santunan yang tidak selamanya dan selektif kepada individu, keluarga, komunitas, dan masyarakat umum dengan tujuan melindungi mereka dari bahaya sosial. Bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin adalah bantuan sementara atau tidak terus menerus yang dimaksudkan untuk membantu mereka menjalani kehidupan yang seimbang.<sup>3</sup> Program bantuan sosial merupakan bagian dari program jaminan sosial dan merupakan wujud tanggung jawab dan kepedulian pemerintah pusat atau daerah terhadap kondisi masyarakat miskin dan terlantar. Bantuan sosial reguler datang dalam bentuk Program

---

<sup>3</sup> Noni Noerkaisar, "Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah Untuk Mnegatasi Dampal Covid-19 di Indonesia", dalam kemenkeu.go.id di akses 7 Juni 2024

Keluarga Harapan (PKH), program sembako, dan Kartu Prakerja. Pemerintah melalui Kementerian Sosial telah mengambil kebijakan perluasan program PKH. Selain PKH, bantuan sosial nonkonvensional juga mencakup empat jenis, yaitu bantuan sembako, bantuan sosial tunai (BST), bantuan langsung tunai dana desa, dan pembebasan tagihan listrik. Sedangkan penerima bantuan langsung tunai dana desa adalah warga desa yang masuk dalam pendataan RT/RW di masing-masing desa. Pemerintah juga menggratiskan tagihan listrik bagi pengguna listrik berkapasitas 450 VA dan memberikan diskon tagihan listrik sebesar 50% bagi pengguna listrik berkapasitas 900 VA.<sup>4</sup>

Pemerintah pusat bekerja sama dengan berbagai Dinas Sosial daerah untuk mengalokasikan dana bantuan sosial. Dinas Sosial juga bekerja sama dengan pemerintah daerah, yang perannya dalam mengumpulkan data masyarakat yang sangat penting. Bantuan sosial Bantuan sosial di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar diberikan melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), dan Program Sembako. Penyaluran bantuan pemerintah dilakukan dengan dua cara, yaitu nontunai dan tunai. Cara nontunai dilakukan dengan cara mentransfer uang ke rekening penerima bantuan, sedangkan cara tunai langsung diantar ke kediaman penerima bansos, bersama perangkat desa, atau langsung diambil di kantor pos terdekat. Penelitian ini akan mendalami sistem bantuan sosial, khususnya Program Keluarga Harapan (PKH). Tujuan PKH adalah menurunkan angka kemiskinan

---

<sup>4</sup> Anna Zahrotul Wahidah, dkk, "Prosedur Penyaluran Bantuan Sosial di Era Covid-19 Pada Dinas Sosial Kabupaten Blitar", dalam [journal.trunojoyo.ac.id](http://journal.trunojoyo.ac.id) di akses 23 September 2023

di Indonesia. Dana bantuan tunai bersyarat dalam jangka pendek diproyeksikan mampu mengurangi tekanan pada pengeluaran rumah tangga (dampak tidak langsung). Pada akhirnya, ini merupakan komitmen terhadap masa depan yang lebih positif bagi generasi melalui peningkatan kesehatan dan pendidikan (efek pengembangan sumber daya manusia). Program Keluarga Harapan (PKH) dimulai serentak di seluruh wilayah Indonesia mulai tahun 2007, termasuk wilayah Kabupaten Blitar. Pelaksanaan program berlangsung di 22 kecamatan di wilayah Blitar antara lain Bakung, Binangun, Doko, Gandusari, Garum, Kademangan, Kanigoro, Kesamben, Nlegok, Panggungrejo, Ponggok, Sanankukon, Selorejo, dan Wates. Beberapa masyarakat yang sudah mampu juga masih menikmati bantuan yang diterima. Berdasarkan hasil wawancara Ketua Linjamsos Dinas Sosial Kabupaten Blitar mengatakan bahwa:

“sebagian bantuan disalurkan tidak pada orang yang membutuhkan karena kurangnya pengontrolan data. Selain itu, masih terdapat masyarakat yang mengajukan dirinya untuk didaftarkan ke kelompok masyarakat kurang mampu agar mendapatkan bantuan sedangkan dalam data tidak termasuk penerima bantuan.”<sup>5</sup>

Berdasarkan data di atas, beberapa permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial tidak disalurkan tepat pada sasaran, masih terdapat masyarakat yang kurang paham tentang kriteria dan prosedur bantuan sosial, dan ada sebagian masyarakat yang kurang memahami kondisi perekonomiannya, dari permasalahan tersebut Kecamatan Wonodadi membuat forum antara operator desa/kelurahan dengan pendamping untuk mengatasi

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Ketua Linjamsos Ibu Yuni Rahayu pada tanggal 25 Maret 2024

masalah data keluarga penerima manfaat agar pengontrolan data dan penerimaan bantuan sosial dapat tepat sasaran. Berikut keterangan Pendamping PKH Kecamatan Wonodadi:

“Kami membuat forum dengan operator desa untuk memastikan distribusi bantuan yang tepat sasaran dan efisien melalui pemutakhiran data, verifikasi, dan validasi penerima manfaat.”<sup>6</sup>

Pengembangan kebijakan anggaran bantuan sosial harus fokus pada prinsip-prinsip yang masuk akal dan kriteria yang telah ditetapkan. Hal ini berarti mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat dan komunitas secara luas dalam hal kesetaraan, keadilan, kesesuaian, dan transparansi dengan tujuan untuk menjaga akuntabilitas lembaga-lembaga publik. Uraian yang merinci kategori pengeluaran memungkinkan penerima untuk memahami dengan jelas berapa banyak dana yang tersedia untuk setiap kategori dan untuk tujuan apa mereka dapat membelanjakannya.<sup>7</sup>

Akuntabilitas merupakan aktivitas penyediaan informasi dan pengungkapan aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas inilah yang mendasari pelaporan keuangan pemerintah. Oleh karena itu, berarti menjadi tanggung jawab masyarakat untuk mengetahui kebijakan apa saja yang diambil oleh pihak-pihak yang diberi tanggung jawab tersebut. Demikian pula, pemerintah juga harus mampu memberikan jawaban tepat waktu terhadap pertanyaan apa pun terkait cara mereka

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Pendamping PKH Kecamatan Wonodadi Ibu Wilda pada tanggal 27 Maret 2024

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal.16

menjalankan kewenangannya, cara mereka mengelola sumber daya yang tersedia, dan pencapaian terukur apa yang bisa mereka peroleh; bahkan hingga pertanyaan dan klarifikasi mengenai masalah akuntabilitas. Akuntabilitas dikenal sebagai salah satu fitur yang melekat dalam akuntansi, dan ini khususnya berlaku untuk akuntansi sektor publik. Secara khusus, salah satu tujuan utama akuntansi sektor publik adalah untuk memerangi korupsi, kolusi, dan nepotisme untuk menjamin masyarakat yang adil dan merata di mana kesejahteraan dapat ditingkatkan.

Bantuan sosial sudah lama diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun, selalu ada masalah saat memberikan bantuan sosial baik tunai maupun nontunai. Untuk menghindari kesalahpahaman yang dapat menghambat penyaluran bantuan sosial, informasi yang lengkap dan jelas tentang jenis dan kriteria bantuan sosial harus diberikan kepada masyarakat. Ada hubungan erat antara transparansi dan akuntabilitas. Pada akhirnya, transparansi pengelolaan keuangan negara akan menghasilkan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakatnya. Ini akan menghasilkan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, akuntabel, dan responsif terhadap keinginan dan kebutuhan masyarakat. Transparansi dapat dianggap sebagai alat yang efektif untuk mencegah korupsi. Sangat penting untuk organisasi yang tidak korup dan akuntabel untuk memulai keterbukaan dengan merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan program dan kegiatan.

Jika ada kejelasan tentang tanggung jawab dan kewenangan, proses penganggaran yang terbuka, dan pihak independen menjamin integritas tentang

prakiraan fiskal, informasi, dan penjabarannya, transparansi dapat dicapai. Anggaran untuk bantuan sosial harus dijelaskan dalam detail setiap item yang dibelanjakan sehingga jelas siapa yang akan menerimanya, serta tujuan dan tujuan penggunaannya.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, penulis mengambil penelitian mengenai peran akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar. Dengan ini peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi Akuntabilitas, Transparansi, dan Tanggung Jawab Program Bantuan Soisial di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar”**

#### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi akuntabilitas program bantuan sosial di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana implementasi transparansi program bantuan sosial di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar?
3. Bagaimana implementasi tanggung jawab program bantuan sosial di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar?

#### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendiskripsikan implementasi akuntabilitas program bantuan sosial di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.

2. Untuk mendiskripsikan implementasi transparansi program bantuan sosial di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.
3. Untuk mendiskripsikan implementasi tanggung jawab program bantuan sosial di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.

#### D. Batasan Masalah

1. Bagaimana implementasi akuntabilitas program bantuan sosial PKH di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana implementasi transparansi program bantuan sosial PKH di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar?
3. Bagaimana implementasi tanggung jawab program bantuan sosial PKH di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar?

#### E. Manfaat Penelitian

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan terhadap peran akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab jawab penyaluran bantuan sosial PKH dalam mewujudkan GCG berdasarkan perspektif syariah

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Dinas Sosial Kabupaten Blitar

Dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai kontrol program penyaluran bantuan agar penerimaan bantuan dapat terasalurkan tepat sasaran dan dapat diterima semua pihak yang bersangkutan.

b. Bagi Kecamatan Wonodadi

Dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai evaluasi program agar penerimaan bantuan dapat tersalurkan tepat sasaran dan dapat diterima semua pihak yang bersangkutan.

c. Bagi Akademik

Bagi pihak akademik menambah literatur dan bisa dipakai referensi ilmiah mengenai implementasi akuntabilitas,transparansi,dan tanggung jawab program bantuan sosial PKH .

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi penelitian selanjutnya dapat digunakan referensi dan dapat menambahkan variabel yang belum ada.

## F. Definisi Istilah

### 1. Secara Konseptual

#### 1) Akuntabilitas

Dalam akuntabilitas, pihak pemegang amanah (agent) bertanggung jawab untuk memberikan pertanggungjawaban, menampilkan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang bertanggung jawab

kepada pemberi amanah (principal), yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.<sup>8</sup>

## 2) Transparansi

Transparansi adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap orang memiliki akses atau kebebasan untuk mengetahui tentang penyelenggaraan pemerintah, termasuk informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil yang dicapai.<sup>9</sup>

## 3) Tanggung jawab

Pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan harus mempertanggungjawabkannya kepada publik dan kepada organisasi tempat kerjanya. Sebagai organisasi yang mengelola dana masyarakat, pemerintah sebagai organisasi sektor publik harus mampu memberikan pertanggungjawaban kepada publik.<sup>10</sup>

### e. Bantuan sosial

Bantuan sosial adalah jenis bantuan yang diberikan secara terus menerus dan selektif kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan mereka. Pemerintah daerah sebagai pemberi bantuan sosial

---

<sup>8</sup> Mufazzal, and Zainal Abidin. "Transparansi Dan Akuntabilitas Bantuan Dana Keuangan Partai Politik Dari APBA (Studi Kasus Lima Partai Politik Dominan Di Parlemen Aceh Tahun Anggran 2014) dalam jim.usk.ac.id, diaksaes 23September 2023

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm 6

<sup>10</sup> Agnes Sediana Milasari D, "Pogram Bantuan Sosial dan Akuntabilitasnya" Program Bantuan social dan Akuntabilitasnya (kemenkeu.go.id) di akses 23 September 2023

dan masyarakat atau lembaga kemasyarakatan sebagai penerima bantuan sosial

masing-masing bertanggung jawab atas bantuan sosial sesuai dengan posisi mereka menurut ketentuan yang berlaku.<sup>11</sup>

f. Program Keluarga Harapan (PKH)

Salah satu program pemerintah Indonesia untuk mengurangi kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini memberikan bantuan tunai kepada orang-orang yang tidak mampu jika mereka memenuhi persyaratan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, seperti pendidikan dan kesehatan.<sup>12</sup>

G. Sistematika Penulisan

Skripsi berisikan bab 1 sampai dengan bab 6 yang akan kita kerjakan, penyusunan harus terstruktur, agar skripsi harus dengan data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan. Berikut sistematika penyusunan skripsi:

BAB I

Bab I terdiri dari latar belakang yang berisi penjelasan masalah serta alasan memilih topik penelitian, selain latar belakang ada rumusan masalah, tujuan

---

<sup>11</sup> Juriah dan Nur Fadhilah Ahmad Hasibuan, "Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi kasus Dibidang Fakir Miskin Pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal), dalam <https://doi.org/10.53697/emba.v2i2>, di akses 23 September 2023

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm 2.

penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

## BAB II

Bab II terdiri berupa kajian pustaka yang terdiri dari kajian fokus pertama, kajian fokus kedua, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

## BAB III

Pada bab III mengenai metodologi penelitian, menjelaskan metode secara jelas dan rinci gambaran secara utuh, dari rancangan penelitian yang akan penulis lakukan yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

## BAB IV

Pada bab IV mengenai hasil penelitian yang terdiri dari paparan data dan temuan penelitian.

## BAB V

Pada bab V membahas mengenai analisis dengan cara melakukan konfirmasi dan sintesis antara temuan penelitian dengan teori dan penelitian yang sudah ada.

## BAB VI

Pada bab VI merupakan bab terakhir pada penulisan skripsi yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran atau rekomendasi.